

## **PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI KASUS DI LSM IRE YOGYAKARTA)**

Oleh: Ratnasari , Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,  
[Sari99374@gmail.com](mailto:Sari99374@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengalaman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Institute For Research And Empowerment* (IRE) melalui program pendidikan pemilih pada pemilu tahun 1999, riset pemilu di Kota Yogyakarta dan Pilkada di Kulonprogo, serta bekerjasama dengan KPU Gunung Kidul melaksanakan TOT (Training Of Trainers) dengan Tema Mendorong Pemilih Pemula Sebagai Kader Demokrasi Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan Peran LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) walikota Yogyakarta, dan (2) menjelaskan strategi pendidikan politik LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Pilkada.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan subyek dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subyek dari penelitian ini adalah aktivis LSM IRE serta anggota komisioner KPU Kota Yogyakarta. Obyek dari penelitian ini adalah peran dan strategi yang dilakukan oleh LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik. Teknik analisis data model interaktif menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Yogyakarta 2017 sebagai periset tingkat partisipasi masyarakat untuk pilkada Kota Yogyakarta 2017 dan pemantau yaitu memantau ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi saat pilkada, hal-hal unik yang dilakukan oleh panitia pilkada di TPS-TPS guna menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta melakukan pemantauan terhadap jalannya pemungutan suara pada pilkada yang penting guna memastikan bahwa pilkada berlangsung tertib, aman, transparan serta terbuka (2) Strategi yang dilakukan oleh LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dengan menggunakan diskusi dan publikasi.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pilkada, Peran LSM, Kota Yogyakarta, LSM IRE*

## **THE ROLES OF A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN INCREASING PEOPLES'S PARTICIPATION IN THE REGIONAL HEAD ELECTION IN YOGYAKARTA CITY IN 2017 (A CASE STUDY OF NGO OF IRE OF YOGYAKARTA)**

By: Ratnasari, Social Studies Education, Yogyakarta State University, [sari99374@gmail.com](mailto:sari99374@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The experiences of the non-governmental organization (NGO) o Institute for Research and Empowerment (IRE) were demonstrated through a voter education program in the 1999 general election, electoral research in Yogyakarta City, and the regional head election in Kulonprogo, and in cooperation with the general election commission in Gunung Kidul in the implementation of a training of trainers with theme of Encouraging Beginner Voters as Village Democracy Cadres. This study aimed to: (1) Describe the roles of NGO of IRE in increasing the participation of people in Yogyakarta City in the regional head election for the mayor of Yogyakarta, and (2) Explain the political education strategies of NGO of IRE in increasing the participation of people in Yogyakarta City in the regional head election.

This was a qualitative study using the case study approach. The subjects were selected by means of the purposive sampling technique. The research subjects were activists in NGO of IRE and commissioner members of General Election Commission of Yogyakarta City. The research objects were the roles and strategies undertaken by NGO of IRE in increasing people's participation in the regional head election in Yogyakarta City in 2017. The data were collected through interviews, observations, and documentation. The data trustworthiness was enhanced by the technique triangulation. The data analysis technique was the interactive model consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion/verification.

The results of the study are as follows. (1) The roles of NGO of IRE in increasing people's participation in the regional head election in Yogyakarta City in 2017 were as a research institution on the level of people's participation for the regional head election in Yogyakarta City in 2017 and as monitoring institution to monitor whether or there were violations that occurred during the election, unique things done by the regional head election, and more importantly to ensure that the regional head election was orderly, safe, transparent, and open. (2) The strategies undertaken by NGO of IRE in increasing the participation of people of Yogyakarta City were through discussion and publication.

**Keywords:** *People's Participation, Regional Head Election, Roles of NGO, Yogyakarta City, NGO of IRE*

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komponen lain dapat berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kehidupan politik. penyelenggaraan pemerintahan telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati demokrasi pada tingkat lokal yang disebut pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pilkada tersebut rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak Juni 2005 Indonesia mulai menganut sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

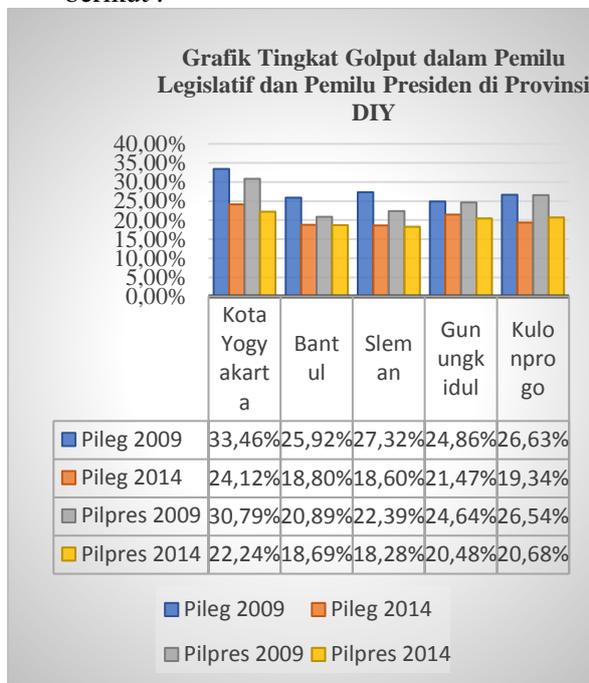
Sistem Pilkada secara langsung ini dirasakan lebih menjanjikan terciptanya demokratisasi. Bandingkan dengan sistem sebelumnya yaitu UU No.5 Tahun 1974 ataupun UU No.2 Tahun 1999 bahwa kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya secara bebas tanpa adanya tekanan, baik berupa intimidasi ataupun kekerasan politik dirasakan sangat luas. Pelaksanaan pilkada langsung ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) yang kemudian bertanggungjawab kepada DPRD. Tercantumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 57 ayat 1,2 (satu,dua) tentang pemerintah daerah yang berbunyi:

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat diberikan kesempatan oleh negara dalam menentukan sendiri segala bentuk kebijakan baik itu menyangkut harkat maupun martabat rakyat daerah. Sistem pilkada langsung ini masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang berada di negara demokrasi merupakan implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi terhadap kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput).

Golput merupakan salah satu ancaman yang membayangi pemilu maupun pilkada. Golput menyebabkan ketidakakuratan hasil pemilu maupun pilkada yang didapatkan pada tiap-tiap daerah pemilihan. Selain itu, keberadaan golput sama saja dengan memperburuk pandangan negara lain terhadap negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa banyak warga negara Indonesia yang kurang berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan negaranya sendiri. Artinya bahwa masyarakat Indonesia cenderung masih tidak mau tahu dan hanya menerima saja apapun hasil yang didapat dari pemilu maupun pilkada tersebut, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada negaranya sendiri.

Salah satu contohnya Kota Yogyakarta, ternyata kota yang terkenal sebagai Kota Pelajar ini juga salah satu penyumbang golput di Indonesia. Berdasarkan data dari KPU Kota Yogyakarta dan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta termasuk tingkat golputnya tinggi jika dibandingkan dengan 4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Kulonprogo. Berikut adalah data Golput pada Pemilihan Legislatif (pileg) tahun 2009 dan tahun 2014 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009 dan tahun 2014 yang diperoleh dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tingkat Golput dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 dan Tahun 2014

Berdasarkan data pada gambar 1 tersebut bahwa Kota Yogyakarta presentase untuk golput (golongan putih) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2009 dan 2014 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi tertinggi. Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009 Kota Yogyakarta angka golput 33,46 % dan 30,79 %. Bandingkan dengan Kabupaten

Gunungkidul yang golputnya hanya mencapai 24,86 % dan 24,64 %. Kemudian, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 Kota Yogyakarta juga menduduki posisi tertinggi dalam hal golput. Pada Pileg tahun 2014 sebanyak 24,12 % dan Pilpres tahun 2014 22,24 %. Berdasarkan data pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa fenomena golongan putih (golput) di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya rendah dalam berpartisipasi pada Pemilu maupun Pilkada.

Data golput yang diperoleh dari KPU Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam Pilkada Tahun 2006 dan Tahun 2011 termasuk memiliki persentase tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Kulonprogo. Berikut adalah data golput pada pilkada Tahun 2006 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase data golput (golongan putih) pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2006 dan Tahun 2011.

NO	Kota/Kabupaten	TAHUN	
		2006	2011
		Persentase	Persentase
1	Kota Yogyakarta	46,68 %	35,54 %
2	Bantul	23,48 %	26,31 %
3	Kulonprogo	24,34 %	30,30 %
4	Sleman	22,31 %	29,33 %
5	Gunungkidul	24,73 %	28,13 %

Meskipun golput bisa menjadi hal yang sangat merugikan, nampaknya golput itu sendiri menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Pemilu Indonesia termasuk pilkada yang menggunakan legitimasi formal dan prinsip memilih sebagai hak, bahwa golput tidak haram. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidak membatalkan hasil pemilu maupun pilkada. Secara substantif, tingginya dan bahkan kemenangan golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu maupun pilkada dan pemenang. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih disebut golput murni. Istilah tersebut

memiliki arti bahwa pemilih tersebut memperoleh kartu pemilih dan bertempat tinggal di daerah pemilihan, namun tidak menggunakan hak pilihnya.

Nasrullah (2006: 19) mengatakan bahwa jenis pemilih yang tidak menggunakan hak pilih antara lain pemilih yang merasakan terjadinya konflik internal partai, fanatisme ideologi kepartaian yang tidak mungkin dapat disatukan dalam bentuk koalisi, komposisi figur dalam bentuk pasangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pemilih yang sudah bosan dengan janji-janji semata tanpa ada bukti riil dalam implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan dari Nasrulloh tersebut merupakan jenis pemilih yang dapat mengakibatkan partisipasi masyarakat rendah. Berikut tabel tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2006 dan Tahun 2011 yang diperoleh dari KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

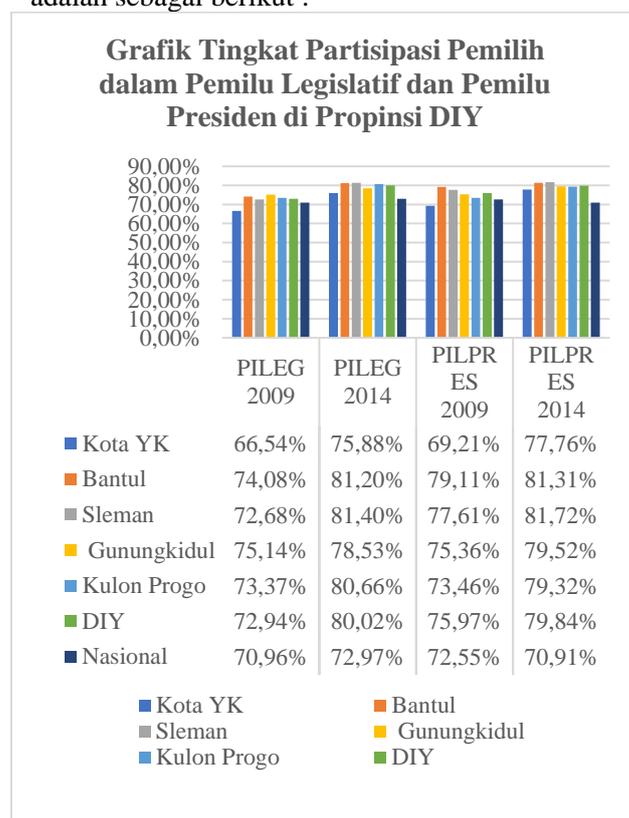
Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2006 dan Tahun 2011.

NO	Kota / Kabupaten	TAHUN	
		2006	2011
		Persentase	Persentase
1.	Kota Yogyakarta	53,32 %	64,46 %
2	Bantul	76,52 %	73,69 %
3	Kulonprogo	75,66 %	69,70 %
4	Sleman	77,69 %	70,67 %
5	Gunungkidul	75,27 %	71,87 %

Berdasarkan tabel 1 bahwa partisipasi masyarakat di Kota Yogyakarta masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, serta Kulonprogo. Pilkada tahun 2006 Kota Yogyakarta tingkat partisipasi masyarakatnya hanya 53,32 % dari jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 190.922 jiwa. Pilkada tahun 2011 Kota Yogyakarta juga masih menduduki posisi paling rendah yaitu 66,46 % dari jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 208.743 jiwa.

Partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014 juga masih tergolong rendah. Partisipasi

pemilih di Kota Yogyakarta pada pencoblosan pemilu baik pemilu legislatif dan pemilu presiden Tahun 2014 terendah dibandingkan partisipasi pemilih di empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Berikut data partisipasi pemilih pada pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014 yang diperoleh dari KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 dan Tahun 2014.

Berdasarkan data dari gambar 2 (dua) partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta memang terendah, tetapi secara statistik terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2009, saat itu tingkat partisipasi pemilih masih dalam kisaran 60 persen. Kedudukan tingkat partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul serta terakhir Kota Yogyakarta.

Nasrullah (2006: 71) mengemukakan bahwa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2006, karena muncul

ketidakpastian politik yaitu terjadi penundaan dari 16 Juli 2006 menjadi 13 Agustus 2006. Keadaan tersebut disebabkan karena masih dalam suasana bencana gempa bumi. Berbeda dengan tahun 2006, pada tahun 2011 penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yaitu munculnya fenomena golput (golongan putih), faktor data pemilih yang kacau, serta ketidakmauan pemilih untuk melaksanakan pemilu dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Data pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pilkada tahun 2006 sebanyak 167.143 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 114.740 jiwa.

Fenomena sosial di atas tentu sangat memprihatinkan karena pada dasarnya sebagai warga negara yang baik salah satunya yaitu ikut berpartisipasi atau mengikuti pesta politik. Surbakti (2010: 180) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Berdasarkan pernyataan tersebut warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dapat dibagi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Pemikiran yang mendasari tentang konsep partisipasi politik di negara-negara demokratis ialah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama. Tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat itu serta menentukan orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.

Kesadaran berdemokrasi masyarakat Kota Yogyakarta tergolong masih kurang, sehingga perlu adanya pendidikan politik. Menurut Kartono (2009 : 65-66) bahwa Pendidikan politik merupakan proses belajar, bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi lebih menekankan kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, dan melatih ketangkasan aksi/berbuat. Selanjutnya individu murni dan mutlak bebas mutlak itu tidak ada. Keberadaannya selalu terkait dengan individu-individu lain, sebab pendidikan politik ada di tengah situasi-situasi kebersamaan dengan orang lain di tengah masyarakat, sehingga sebagai manusia itu harus terus- menerus belajar hidup rukun bersama dalam satu ikatan kemasyarakatan, dari yang kecil sampai ke

ikatan kebangsaan dan kenegaraan, supaya manusia mampu memahami status dirinya selaku warganegara itulah diperlukan pendidikan politik yang secara intensional mengarah pada peningkatan pemahaman status diri sendiri selaku warganegara yang baik di tengah pergaulan hidup bersama, serta menyadari fungsi politiknya selaku warganegara.

Pendidikan politik pada pelaksanaan pilkada di Kota Yogyakarta sangat penting dilakukan, karena dalam rangka meminimalisir rendahnya partisipasi masyarakat serta golput. Rendahnya partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam hal ini juga perlu adanya pendidikan politik guna menyadarkan masyarakat Kota Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kondisi seperti ini menuntut penyelenggara pilkada, peserta pilkada, serta seluruh *stakeholder* (petaruh) baik organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) serta masyarakat untuk terus selalu menyebarluaskan informasi tersebut secara berkelompok.

Sejak reformasi setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat, berpartisipasi dalam program pemerintah. Ruang politik semakin terbuka lebar, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba). Keterbukaan ini memberikan kesempatan pada sejumlah kelompok, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berperan dalam penyelenggaraan politik, seperti pilkada. LSM dipandang memiliki peran yang signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini mempunyai fungsi dan ciri-ciri yang khas, berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), maka mampu untuk menjalankan tugas tertentu dan tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. LSM memiliki peran yang cukup strategis. LSM/NGO (*Non-government*) berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kepada kekuasaan. LSM mempunyai karakteristik yaitu independen, tidak mencari keuntungan ekonomi seperti halnya swasta, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Sistem politik yang demokratis, menurut LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Keadaan politik yang lebih demokratis seperti saat ini, banyak LSM menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah sekeras dulu, meskipun demikian masih terdapat

kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap harus dikritisi.

Gaffar (2006: 205) berpendapat bahwa LSM memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk memunculkan *civil society*. Membahas mengenai LSM sesungguhnya berkaitan erat dengan *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil Society* yang kuat dan mandiri. Organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*.

Berkaitan dengan itu maka *civil society* bermakna sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan negara dibatasi di dalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka perumusan kebijaksanaan publik. Konteks ini setidaknya LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai peran LSM tersebut LSM *Institute for Research and Empowerment* (IRE) dapat mengambil peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pilkada walikota Yogyakarta tahun 2017, dalam rangka mewujudkan *civil society* yang kuat dan mandiri. LSM IRE Yogyakarta adalah sebuah lembaga independen, nonpartisipan dan nonprofit yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Fokus kegiatan IRE adalah memperluas dan memperdalam demokrasi melalui penguatan gagasan, sikap kritis serta tindakan taktis elemen masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan negara.

Berdasarkan informasi dari Bapak Wibowo yang merupakan salah satu Aktivistis LSM IRE mengemukakan bahwa LSM IRE memiliki peran dan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu maupun pilkada. Ketika menjelang Pemilihan Umum 1999 pernah LSM IRE strategi yang dilakukan yaitu menggelar program pendidikan pemilih yang didukung oleh ACILS Indonesia, bulan Mei 2015 IRE bekerjasama dengan KPU Kota Yogyakarta berperan sebagai periset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum, kemudian pada bulan April hingga Juli 2006 IRE Yogyakarta juga berperan sebagai periset serta melakukan program Riset Mandiri tentang Pilkada di Kabupaten

Kulonprogo. Bulan November 2015 IRE juga bekerjasama dengan KPU Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan TOT dengan tema “Mendorong Pemilih Pemula Sebagai Kader Demokrasi Desa” pada komunitas muda pemilih pemula di Kabupaten Gunung Kidul. Lingkup kerjasama yang dilakukan adalah berperan sebagai dinamisator yaitu menyusun instrumen dan modul pelatihan, kemudian strateginya berupa kegiatan pelatihan. Peran dan strategi itulah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih LSM IRE Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada tahun 2017. Peneliti juga menganggap karena IRE sudah terbiasa melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat bahkan memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga peneliti percaya bahwa IRE mampu untuk mendorong masyarakat dalam mengikuti kegiatan politik seperti ikut berpartisipasi dalam pilkada. Kota Yogyakarta yang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah yang tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan 4 (empat) daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berkaitan dengan kegiatan IRE sekarang tidak lagi hanya memainkan peran sebagai kelompok studi yang berkulat pada diskusi rutin, tetapi berkembang menjadi LSM yang berkiprah pada pengembangan demokrasi bagi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian dan keadaban demokrasi masyarakat lokal terlebih lagi perannya yang begitu strategi itu belum diketahui oleh banyak orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, penelitian yang akan dilaksanakan berjudul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Kasus Di LSM IRE Yogyakarta). Penelitian dapat dijadikan literasi studi, bersifat penting dan layak untuk diteliti karena melihat masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta politik seperti pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota Kota Yogyakarta. Selain itu, belum adanya lembaga yang secara khusus mengatasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana peran dan strategi LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pilkada walikota di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Judul penelitian ini yaitu Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus Di LSM IRE Yogyakarta). Berdasarkan judul tersebut, maka jenis penelitiannya yaitu kualitatif, karena peneliti bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 secara mendalam dan kondisi yang alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, karena dalam penelitian ini fokus peneliti pada peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2017. Fenomena yang terjadi berupa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam mengikuti pesta politik yaitu baik pemilu maupun pilkada.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pertama, di Kantor LSM IRE Yogyakarta, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 9.5, Dusun Tegalrejo, RT 01/RW 09, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kedua, di KPU Kota Yogyakarta, Jl. Magelang No.41, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal pada bulan Oktober 2016 dan kemudian dilanjutkan pengambilan data pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

### **3. Penentuan Subyek dan Obyek**

Penentuan subyek dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subyek dari penelitian ini adalah aktivis LSM IRE serta anggota Komisioner KPU Kota Yogyakarta. Obyek dari penelitian ini adalah peran dan strategi LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Peneliti melakukan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang ada di lapangan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta, seperti kegiatan diskusi bulanan yang dihadiri oleh para calon-calon walikota Yogyakarta.

#### **b. Wawancara**

Wawancara ditujukan kepada aktivis LSM IRE Yogyakarta dan anggota Komisioner KPU Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran dan strategi LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2017.

#### **c. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk foto-foto tentang kegiatan-kegiatan LSM *Institute Of Research And Empeworment* (IRE) dalam peran dan strateginya pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017.

### **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu peneliti sendiri dengan dibantu alat penelitian berupa pedoman observasi yaitu pengamatan yang dituangkan dalam tulisan untuk mencari data peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2017, serta pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan untuk mencari data tentang peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada Pilkada tahun 2017.

### **6. Teknik Analisis Data**

Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Milles dan Hubberman (2014: 20):

#### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang memuat tentang peran LSM IRE terhadap masyarakat serta tentang Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

b. Reduksi data

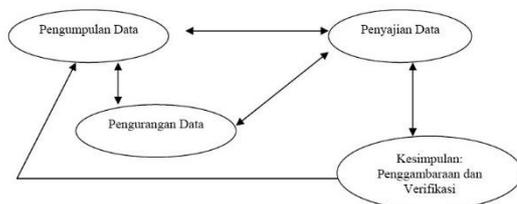
Tahap reduksi ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan peneliti serta lebih memfokuskan pada hal-hal penting terkait peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta Pada Pilkada tahun 2017.

c. Penyajian data

Tahap ini dilakukan setelah data hasil wawancara, observasi, dokumentasi direduksi. Data-data yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif mengenai peran dan strategi LSM IRE Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta Pada Pilkada tahun 2017.

d. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang ada di lapangan yang telah disajikan. Berikut ini bagan teknik analisis data interaktif model Miles dan Hubberman :



Gambar 3. Teknik Analisis Data Interaktif Model Miles dan Hubberman

## 7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi metode. Triangulasi metode adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan metode berbeda untuk mendapatkan sumber data yang sama. Triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti membandingkan data hasil wawancara, data hasil observasi, dan data hasil dokumentasi terkait dalam peran dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2017 yang dilakukan oleh LSM IRE. Triangulasi bertujuan untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul dengan cara membandingkan data dari berbagai waktu dan alat pengumpul data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus pembahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai peran LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada Walikota di Kota Yogyakarta serta strategi pendidikan politik LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta.

### 1. Peran LSM IRE dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta pada Pilkada 2017

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyebutannya merujuk pada organisasi non pemerintah (ornop), yang merupakan terjemahan dari *Non-Government Organisation* (NGO). Menurut Jatna (2008: 445) mengatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang berdiri secara independen dan tidak tergabung dalam struktur pemerintahan. Kemudian, menurut Gaffar (1999: 200) juga menyatakan LSM atau umumnya disebut NGO (*Non Government Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah, negara, terutama dalam dukungan finansial dan sarana-prasarana. Apabila mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, bukan berarti kalangan LSM atau NGO sama sekali terlepas dari pemerintahan, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh LSM itu sendiri.

Kesimpulan dari pernyataan beberapa ahli bahwa LSM merupakan lembaga yang membantu masyarakat secara suka rela tanpa ada campur tangan pemerintah. Seperti halnya LSM IRE (*Institute For Research And Empowerment*) yang pada dasarnya merupakan sebuah lembaga independen, nonprofit, dan nonpartisan yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Terkait dengan sumber dana IRE yang merupakan lembaga yang independen, banyak cara yang bisa dilakukan LSM untuk mendapatkan dana. Biasanya membuat proposal, *revolving fund*, melalui penjualan

Bulletin Flamma, Jurnal Mandatory dan buku hasil-hasil dari penelitian serta melalui lembaga donor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Pact Indonesia, USAID, Acils Indonesia, *Indonesian Rapid Response Initiatives* (IRRI) Pact Indonesia, *Indonesian NGO's Partnership Initiatives* (INPI) Pact Indonesia, *The Ford Foundation* dan Komisi Eropa.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada era reformasi ini perannya semakin diperlukan sebagai salah satu aktor pelaksana program pemerintah, khususnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat luas. Pihak LSM dalam hal ini sendiri tidak begitu banyak mengalami kesulitan, bahkan sejauh ini peran LSM tersebut telah berjalan baik. Pada dasarnya LSM mempunyai tujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara mandiri. Menurut Bastian (2007: 35) mengatakan bahwa dalam melaksanakan programnya, LSM mempunyai peran sebagai motivator, komunikator, dinamisor, fasilitator. Menurut Hagul (1992:114) menyatakan bahwa peranan lain yang dapat dikerjakan LSM adalah mengembangkan inovasi dalam menanggulangi berbagai masalah di masyarakat. Relawan yang berkecimpung di bidang LSM pada umumnya mempunyai latar belakang keahlian dan pengalaman yang beraneka ragam.

Berdasarkan teori-teori di atas peran IRE sebagai periset (*researcher*) tingkat partisipasi masyarakat dan pemantau dalam pilkada Kota Yogyakarta termasuk dalam salah satu peran LSM menurut Indra Bastian yaitu sebagai komunikator. Peran LSM sebagai komunikator yaitu mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Melalui risetnya itu LSM IRE melakukan MOU dengan KPU Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk menemukan akar permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya dapat dihasilkan rekomendasi dan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan. Melalui hasil

penelitian dan rekomendasi inilah LSM IRE mengkomunikasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta.

Kemudian pemantau, peran IRE sebagai pemantau merupakan keterlibatan IRE dalam pilkada 2017. IRE sebagai pemantau dalam perannya tersebut melibatkan masyarakat untuk memantau jalannya pilkada. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara langsung untuk ikut memantau sebelum dan ketika pilkada itu berlangsung. Masyarakat Kota Yogyakarta ini selain datang ke TPS lalu mencoblos, disisi lain masyarakat Kota Yogyakarta juga ikut memantau proses terselenggaranya pilkada tersebut. Hal ini ada beberapa laporan terkait pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, misal pemasangan Alat Peraga Kampanye yang pemasangannya tidak sesuai tempatnya, contohnya di pohon, pagar, serta tembok-tembok. Berikut adalah peran LSM IRE sebagai periset dan memantau dalam Pilkada Walikota Kota Yogyakarta 2017 :

#### **a. Peran IRE sebagai Periset**

Peran IRE sebagai periset bertujuan untuk menemukan akar permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pada pemilu 2014 yang kemudian dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menyusun kebijakan tata kelola pilkada walikota 2017. Peran IRE sebagai periset pada pemilu 2014 tersebut, melalui hasil-hasil penelitiannya dapat dijadikan evaluasi dan rekomendasi LSM IRE kepada KPU Kota Yogyakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pilkada 2017 ini.

Berikut adalah temuan hasil penelitian riset yang dilakukan oleh LSM IRE Yogyakarta :

- 1) Tahap Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimtek :
  - a) KPU kota belum ditopang oleh kekuatan penyelenggara Pemilu lainnya dalam menjalankan peran dan tugas dalam menyelenggarakan Pemilu.
  - b) Terbatasnya kewenangan KPU Kota Yogyakarta dalam penggunaan metode untuk sosialisasi.
  - c) Tatap muka masih menjadi metode sosialisasi paling diminati oleh masyarakat.
  - d) Materi sosialisasi didominasi hal teknis, minim pendidikan politik, sehingga lebih mengarah pada pendidikan pemilih.

- e) Belum adanya metode sosialisasi yang dikhususkan bagi kelompok difabel.
- 2) Tahap Pembentukan Badan Adhoc :
  - a) Aspek administrasi dan beban kerja menjadi tantangan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Badan Adhoc.
  - b) Masih lemahnya kapasitas Badan Adhoc, baik secara substansi maupun teknis.
  - c) Adanya potensi elite capture dalam pembentukan Badan Adhoc.
- 3) Tahap Pemutakhiran Data Pemilih :  
Ketidakakuratan data pemilih masih menjadi tantangan dalam proses pemutakhiran data.
- 4) Tahap Pencalonan :
  - a) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat untuk turut mengkritisi calon.
  - b) Minimnya informasi calon mempengaruhi semangat untuk berpartisipasi
- 5) Tahap Kampanye :
  - a) Partisipasi dalam kampanye digerakkan oleh kekuatan uang melalui proses mobilisasi.
  - b) Transparansi dana kampanye belum menjawab keingintahuan masyarakat.
- 6) Pemungutan dan Penghitungan Suara :  
Penumpukan partisipasi terjadi pada hari H pemungutan suara saja.
- 7) Evaluasi Pemilu :
  - a) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi.
  - b) Evaluasi Pemilu minim peran serta Partai Politik.

Berdasarkan temuan hasil riset di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ruang partisipasi yang terbuka dalam Pemilu belum dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat.
- 2) Peran KPU dalam melakukan Pendidikan politik belum disertai dengan kurikulum dan metode yang aplikatif untuk dilaksanakan.
- 3) Ruang keterlibatan masyarakat dalam proses kandidasi masih lemah.

Rekomendasi untuk hasil riset tersebut meliputi

- 1) Perbaikan Sistem Pemilu dan Partai Politik
  - a) Membuka ruang diskresi bagi KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan inovasi dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat, misalnya terkait dengan penggunaan media, metode pelibatan masyarakat, pencalonan, mendorong

transparansi serta akuntabilitas dana kampanye dan lain-lain.

- b) Pengaturan kebijakan terkait dengan ruang lingkup pendidikan politik atau pendidikan pemilih yang menjadi peran KPU sebagai penyelenggara pemilu.
- 2) Penataan Kelembagaan  
Membangun persamaan persepsi antar aktor dan kelembagaan dalam rangka memperjelas peran dan membangun sinergi kerja.
- 3) Peningkatan kapasitas dan pengetahuan
  - a) Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu, khususnya badan adhoc hingga level terbawah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
  - b) Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, yang dapat diperankan oleh Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan peran IRE sebagai periset melalui hasil-hasil penelitian dan rekomendasi inilah maka peran IRE sebagai periset dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pilkada 2017. Alasannya melalui hasil penelitian dan rekomendasi ini, maka IRE akan menyampaikan hasil penelitiannya dan rekomendasi tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pilkada 2017 ini.

Berdasarkan hasil riset dan rekomendasi dari IRE, maka tindakan dari KPU Kota Yogyakarta berupa membuat gubug informasi, yang tujuannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi mengenai pelaksanaan pilkada 2017. Keberadaan gubug informasi di tiap kecamatan merupakan terobosan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik warga yang pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pilkada. Kemudian KPU Kota Yogyakarta terkait dengan difabel, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pendataan dan identifikasi pemilih difabel di seluruh TPS di Kota Yogyakarta, berupaya mempersiapkan sarana aksesibel yang spesifik bagi difabel jenis tertentu seperti pembuatan template braille untuk tunanetra, bekerjasama dengan pegiat difabel untuk melakukan simulasi

sebelum hari pencoblosan, serta menggunakan metode pendampingan saat para difabel datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Selain itu peran IRE sebagai periset dalam pilkada Kota Yogyakarta tersebut digunakan untuk memperdalam demokrasi yang ke depannya dapat dilakukan dengan mengadaptasi dan mempertajam pendekatan dalam spesialisasi pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas yang berkaitan dengan representasi dan partisipasi warga, studi politik lokal, *active citizenship*, serta institusi politik dan representasi substantif. Berkaitan dengan peran IRE sebagai periset, maka IRE memiliki staf periset (peneliti) yang kompeten dan reputasi yang baik di bidang keilmuan terkait dengan *governance study*. Atas dasar pengalaman IRE yang dilakukan selama ini, kegiatan riset berfokus *governance and policy reform* ke depan dilakukan dengan mengadaptasi dan mempertajam pendekatan dalam spesialisasi pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas mencakup reformasi dan inovasi pemerintahan daerah, desentralisasi, dan otonomi daerah, reformasi perencanaan dan penganggaran, reformasi pelayanan publik, serta reformasi kebijakan sosial ekonomi.

Berkaitan dengan peran IRE sebagai periset (peneliti) maka respon IRE sebagai lembaga pengetahuan adalah riset dan produksi pengetahuan IRE akan berbasis empiris berupaya mencari dan menemukan kebijakan dan institusi yang sekaligus feasible dapat dijalankan dan desirable/etis, dari sudut pandang multi *stakeholders*, termasuk pemerintah, sektor swasta dan warga sendiri. Riset dan kajian IRE juga akan menempuh pendekatan komparatif terhadap tema tertentu dalam upaya mendorong pencarian model-model kelembagaan yang lebih berbasis pada keragaman budaya dan berbasis hak asasi manusia. Riset dan bantuan teknis IRE akan bersifat nonpartisan dalam arti tidak berpihak kepada salah satu ideologi terutama tidak berpihak kepada pendekatan yang berbasis pada parokhialisme.

Riset dan kerja IRE akan selalu adaptatif dalam upaya untuk peka

terhadap *trend* dan perkembangan dengan tujuan memastikan bahwa produksi pengetahuan IRE akan selalu relevan kepada semua *stakeholder* termasuk kepada pemerintah dan gerakan sosial di Indonesia. Kemudian riset dan produksi pengetahuan untuk mendorong, memajukan, dan memicu perubahan kebijakan dengan memastikan prinsip keadilan gender, emansipasi, kebhinekaan dan toleransi, dan isu-isu keberlanjutan lingkungan hidup.

#### **b. Peran IRE sebagai Pemantau**

Peran IRE sebagai pemantau juga merupakan keikutsertaan IRE untuk ikut memantau jalannya pemungutan suara pada pilkada yang penting guna memastikan bahwa pilkada berlangsung tertib, aman, transparan serta terbuka. IRE yang sebagai pemantau juga memantau ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi saat pilkada serta hal-hal yang unik yang dilakukan oleh panitia pilkada di TPS-TPS guna menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Peran IRE sebagai pemantau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta itu ketika IRE melibatkan masyarakat untuk ikut memantau sebelum dan ketika pilkada itu berlangsung. Masyarakat Kota Yogyakarta ini selain datang ke TPS lalu mencoblos, disisi lain masyarakat Kota Yogyakarta juga ikut memantau proses terselenggaranya pilkada tersebut. Hal ini ada beberapa laporan terkait pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, misal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya tidak sesuai tempatnya, contohnya di pohon, pagar, serta tembok-tembok.

## **2. Strategi Pendidikan Politik LSM IRE dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta**

#### **a. Diskusi bulanan**

Strategi yang digunakan IRE adalah cara untuk memberikan pengetahuan, mendorong serta menyadarkan masyarakat untuk terlibat dalam pilkada. Strategi berupa diskusi merupakan strategi untuk mengajak masyarakat Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan kepada calon walikota dan wakil walikota tentang agenda

pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

## **b. Publikasi**

Strategi berupa publikasi merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktivitas kelembagaan. Bentuk dan hasil publikasi ini adalah majalah *Flamma Review*, *Jurnal Mandatory*, *Policy Brief*, dan buku. Publikasi yang digunakan IRE yang membahas tentang pilkada Kota Yogyakarta yaitu *Flamma Review* edisi 44 dengan judul *Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak*. Melalui majalah *Flamma Review* inilah LSM IRE dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya pilkada, sehingga masyarakat akan sadar betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan Kota Yogyakarta.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran dan strategi LSM IRE dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pilkada 2017 yaitu :

- a. Peran sebagai periset dan pemantau. Adapun hasil risetnya yaitu: (1) ruang partisipasi yang terbuka dalam pemilu dan pilkada belum dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat, (2) peran KPU dalam melakukan pendidikan politik belum disertai dengan kurikulum dan metode yang aplikatif untuk dilaksanakannya, (3) ruang keterlibatan masyarakat dalam proses kandidasi masih lemah. Melalui hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan rekomendasi LSM IRE kepada KPU Kota Yogyakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada pilkada 2017. Kemudian hasil pantauan IRE terhadap pilkada tahun 2017 terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah Pilkada. Pelanggaran yang terjadi diantaranya: pengusiran pengawas TPS (PTPS) oleh KPPS, politik uang, lokasi bilik suara yang dekat dengan cctv, adanya APK tak sesuai dengan aturan, serta petugas yang

tidak netral. Selain itu juga terdapat TPS-TPS yang petugasnya menggunakan kostum sepak bola, baju adat Jawa, TPS dengan tema cafe, dan tema Valentine sehingga petugasnya juga menggunakan baju berwarna pink. Semua ini dilakukan guna menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Peran IRE sebagai pemantau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta itu ketika IRE melibatkan masyarakat untuk ikut memantau sebelum dan ketika pilkada itu berlangsung. Masyarakat Kota Yogyakarta ini selain datang ke TPS lalu mencoblos, disisi lain masyarakat Kota Yogyakarta juga ikut memantau proses terselenggaranya pilkada tersebut. Hal ini ada beberapa laporan terkait pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, misal pemasangan Alat Peraga Kampanye yang pemasangannya tidak sesuai tempatnya, contohnya di pohon, pagar, serta tembok-tembok.

- b. Strategi yang dilakukan oleh LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Yogyakarta melalui diskusi serta publikasi. Diskusi ini membahas tentang Pilkada dan Pembangunan Kota Yogyakarta. Tujuan dari diskusi ini yaitu menghimpun berbagai tantangan pembangunan di Kota Yogyakarta, memberikan masukan kepada calon walikota dan wakil walikota tentang agenda pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta, serta mengajak masyarakat Kota Yogyakarta untuk ikut aktif memberikan masukan tentang pembangunan kota ke depannya. Kemudian melalui publikasi yang berupa *Flamma Review*. Isi dari *Flamma Review* edisi ke 44 yaitu *Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak*. Terkait dengan strategi IRE melalui majalah *flamma review* ini inilah LSM IRE dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya pilkada. Sehingga masyarakat akan sadar betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan Kota Yogyakarta.

## 2. Saran

- a. LSM IRE, sebaiknya pihak internal maupun eksternal LSM IRE menambah dan mengembangkan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta. Strateginya tidak hanya diskusi bulanan dan publikasi.
- b. Peran LSM IRE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu maupun Pilkada perlu ditingkatkan. Pengadaan kegiatan yang praktis melibatkan orang-orang yang berpengaruh (Kepala Desa, Kyai, Ketua RT, maupun Ketua RW) yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal, merupakan solusi yang baik bagi kurangnya keterlibatan orang-orang berpengaruh secara praktis.
- c. Terkait dengan strategi yang digunakan LSM IRE itu berupa publikasi sebaiknya lebih disebarluaskan melalui media yang lebih banyak dibaca orang dan dapat dinikmati oleh kalangan kelas menengah bawah. Karena publikasi melalui Majalah Flamma Review hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, seperti pelajar, mahasiswa, pegawai (hanya dinikmati oleh kalangan kelas menengah atas).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)* cetak IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hagul, P (ed). (1992). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.

Miles, Matthew B & A. Michael Hubberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nasrullah (ed). (2006). *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Propinsi DIY.

Perpus. (2004). *Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah*.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.